

BAB: I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan demokrasi dari masa ke masa selalu mengalami problematika, lantaran tidak terlepas dari berbagai tantangan ideologi maupun praksis. Sejak sistem demokrasi Yunani kuno dan dalam perkembangannya hingga demokrasi kontemporer, muncul isu relativisme politik yang terus mendominasi perdebatan dalam kebijakan publik. Relativisme politik berawal dari pandangan bahwa kebenaran bersifat relatif, tergantung pada latar belakang budaya, konseptual serta kerangka semantik. Pada ranah politik, relativisme tidak mengakui adanya kebenaran atau nilai-nilai universal yang terkandung di dalam politik, melainkan masing-masing orang mempunyai pandangan yang berbeda-beda dalam memahami nilai-nilai politik.¹ Standar atau kriteria kebenaran ditentukan berdasarkan penilaian masing-masing kelompok atau individu berdasarkan latar belakang tertentu. Hal ini cenderung menghambat berjalannya demokrasi, ataupun dapat mengubah jalannya demokrasi, karena selain munculnya berbagai keberagaman dalam pemikiran politik, juga dapat menimbulkan perdebatan dan hilangnya makna dimensi politik sebagai sebuah masyarakat keseluruhan pada suatu Negara.² Karenanya politik cenderung dinilai sepihak atau berat sebelah tergantung pada masing-masing orang atau siapa yang berkuasa.

Kehadiran relativisme politik selain sebagai tantangan dalam perkembangan demokrasi, juga turut menciptakan pluralitas pemahaman dalam masyarakat. Hal ini memicu sikap tendensius terhadap nilai luhur dari politik itu sendiri, karena tidak adanya nilai politik sebagai standar umum atau yang bersifat mutlak dan mengikat bagi semua orang. Relativisme politik mengiring masyarakat untuk memberi anggapan bahwa tidak ada suatu kebenaran mutlak dalam politik. Akibat dari

¹ Mohamad A. Shomali, *Relativisme Etika* (Jakarta: Sharda Press, 2011), hlm. 8.

² Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Gramedia Pustaka Utama, 2021), hlm. 17.

pandangan ini, masyarakat kemudian cenderung beranggapan bahwa kebenaran itu dapat dinilai menurut perspektif kebudayaan dan latar belakang sosial tertentu. Pandangan ini turut mengakui keragaman dan pluralitas. Masyarakat plural dapat saja secara ekstrim berusaha menciptakan ruang nyaman bagi diri mereka sendiri dan menaruh sikap acuh tak acuh terhadap kepentingan bersama.

Isu relativisme politik secara konseptual timbul dari dua aspek utama: *Pertama*, relativisme politik dapat lahir akibat pengaruh dari relativisme moral. Dalam kerangka teoretis moral, relativisme menegaskan bahwa moral tidak memiliki karakter objektif, sebab yang baik dan yang buruk dinilai berdasarkan opini subjektif masing-masing orang, di mana setiap tindakan manusia itu dinilai baik, semua benar, dan tidak ada yang mengafirmasi secara objektif mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk. Konsep ini dapat dikaitkan dengan anggapan bahwa nilai-nilai politik yang diterima oleh suatu masyarakat tidak dapat dipahami sebagai satu-satunya yang benar, karena nilai-nilai yang ada bersifat kontekstual dan relatif terhadap budaya dan kondisi budaya tertentu. Dengan itu, relativisme politik menafikan nilai politik yang bersifat universal.

Kedua, relativisme politik juga lahir akibat dari relativisme budaya. Menurut prinsip ini, setiap budaya secara intrinsik sama bermaknanya dengan yang lain. Artinya bahwa apa yang diyakini dan dipraktikkan dalam setiap budaya memiliki nilai dan hirarki yang sama dan kita tidak dapat membandingkan antara budaya yang satu dengan yang lain. Di sini nilai dalam semua budaya itu harus divalidasi sebagai yang benar. Keterkaitan dengan relativisme budaya adalah anggapan bahwa sistem politik dan kebudayaan dalam suatu negara tidak bisa dipaksakan untuk sesuai dengan norma-norma yang berlaku di negara atau kebudayaan lain. Oleh karena itu, relativisme politik menolak pemaksaan sistem politik tunggal untuk semua masyarakat. Kedua bentuk relativisme tersebut, baik relativisme politik maupun relativisme budaya, berhubungan erat dengan pluralisme dalam masyarakat modern yang semakin kompleks.

Relativisme politik pada dasarnya tetap mengedepankan kebebasan berpikir dan membuka ruang terhadap keberagaman. Hal ini ditandai oleh kenyataan bahwa relativisme politik sama sekali tidak mempersoalkan keberagaman pemahaman

dalam berpolitik, hanya saja setiap kelompok menolak jika ideologinya dikritisi atau diganggu. Sikap relativistik itu turut menyebabkan ketidakstabilan dan tantangan serius dalam ranah demokrasi. Pada ranah ini, relativisme politik memicu terjadinya fragmentasi sosial atau terpecahnya masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang dapat menimbulkan fragmentasi tinggi, yaitu interaksi antar kelompok menjadi terbatas dan solidaritas sosial melemah.³

Kasus lain juga terjadi pada ranah yang sama yaitu relativisme politik dapat memicu terjadinya polarisasi sosial dalam dua kelompok besar. Dua model kasus yang ditampilkan dapat mengerucut pada krisis legitimasi pemerintahan dan penurunan kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Persisnya di mana lembaga pemerintahan atau institusi demokrasi tidak mampu mendamaikan atau mencapai kesepakatan terhadap suatu ketegangan dalam masyarakat. Dengan itu, perlu dicari solusi, yaitu prinsip-prinsip dasar yang bersifat merangkul, seturut prinsip demokrasi itu sendiri, yaitu memperhatikan kepentingan banyak orang ketimbang kepentingan kelompok tertentu.⁴ Ketegangan antara kelompok sosial atau politik dapat menyebabkan kepincangan, terutama terbentuknya radikalisme ideologi dan ketidaksetaraan.

Persoalan-persoalan terkait dapat dipahami atau masih relevan dengan pemikiran Karl Popper. Filsafat politik yang dikembangkan oleh Karl Popper menguraikan perspektif khusus dalam melihat relativisme politik dan tantangannya yang mempengaruhi demokrasi. Popper, dengan konsep masyarakat terbukanya, hendak mempersoalkan ideologi totalitarian sebagai sarana terciptanya relativisme politik. Selain ideologi totalitarian, Popper juga menyebut segala bentuk pemikiran dogmatik yang dapat menciptakan ruang gerak bagi relativisme politik. Ia menyebutkan bahwa segala bentuk pemikiran seperti ini turut membatasi kebebasan individu. Penelaahan Popper secara tegas mengkritik model atau sikap yang mengganggu jalannya demokrasi, yakni relativisme politik berpotensi membentuk model masyarakat tertutup.

³ Petrus Ana Andung, *Sosiologi Komunikasi* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024), hlm. 152.

⁴ Konrad Kebung, *Michel Foucault: Diskursus, Kuasa, Dan Kritik Institusi* (Surabaya: Cerdas Pustaka, 2021), hlm. 234.

Relativisme menekan segala kebebasan masyarakat serta membatasi orang untuk bersikap kritis terhadap ideologi yang dianggap mapan ataupun sikap kritik terhadap kebijakan penguasa yang melawan demokrasi. Pada tahap ini, Popper menyebutkan bahwa kelas penguasa punya monopoli terhadap semua hal terutama dalam hal keuntungan, kebijakan-kebijakan yang dibuat semata-mata demi diri atau kelompok para penguasa.⁵ Popper menegasi relativisme politik yang turut menciptakan masyarakat tertutup dengan suatu pemahaman yang mendukung konstruksi masyarakat yang terbuka. Gagasan yang dimaksud Popper dalam terciptanya masyarakat terbuka adalah masyarakat yang dapat mengakomodir perbedaan dan tidak mesti terjerumus pada ketegangan yang merusak struktur sosial dan politik.

Karl Popper mengemukakan gagasannya terkait masyarakat terbuka melalui karyanya *The Open Society and the enemies* (1945). Karyanya ini merupakan sebuah kritikan terhadap berbagai model totalitarianisme dan ideologi politik yang berani mengklaim diri memiliki kebenaran yang mutlak, termasuk ideologi yang berkembang dalam Historisisme yang dikemukakan oleh beberapa tokoh seperti pandangan Hegel, Marx, dan Plato. Popper dengan tegas mengkritik ideologi Historisisme, karena pandangan ini hanya membuka ruang bagi bangsa besar atau kelas elit untuk menentukan arah sejarah. Selain itu, masa depan juga hanya mungkin jika ditentukan oleh penguasa yang memiliki kekuatan yang besar yang tak terhindarkan. Gagasan Historisisme biasanya diterima begitu saja dan jarang dikritisi serta tidak mengalami pembaruan.⁶ Jika paham ini terus dibiarkan tentu dengan sendirinya akan jatuh ke dalam totalitarianisme yaitu kekuasaan absolut yang dampaknya pada individu-individu tidak memiliki kebebasan karena semuanya ditentukan oleh penguasa absolut yang berperan tunggal dalam panggung politik.

Keyakinan Karl Popper terhadap relativisme politik yang membuka peluang pada pola pikir terciptanya masyarakat tertutup merupakan suatu persoalan yang serius. Dengan menolak ruang kritis bagi masyarakat dan menolak perbedaan

⁵ Karl R. Popper, *Masyarakat Terbuka Dan Musuh-Musuhnya*, trans. Uzair Fauzan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 111.

⁶ *Ibid.*, 12.

pendapat, maka akan terbuka kemungkinan bagi berkembangnya relativisme yang bermuara pada totalitarianisme. Dampak yang paling kuat terhadap masyarakat tertutup dalam tinjauan Popper yaitu terjadi penekanan pada kebebasan pribadi dan pluralisme ideologi. Sementara kontrol terhadap ideologi dan politik semakin terpusat. Penguasa menggunakan kekuasaan penuh untuk menentukan nilai-nilai serta arah pemikiran atau arah politik dari suatu negara atau masyarakat.⁷ Menanggapi persoalan yang berkembang Popper mengajukan suatu model masyarakat terbuka sebagai mediasi untuk meredam berkembangnya masyarakat tertutup dengan cara memastikan ada ruang bagi kritik yang bersifat konstruktif dan terbuka terhadap berbagai pandangan yang ada. Pola pikir masyarakat yang terbuka tentu dengan sendirinya mampu memperjuangkan demokrasi yang stabil dan kondusif. Dalam konteks ini, relativisme politik mesti dikritisi secara mendalam, terutama dampaknya terhadap sistem demokrasi itu sendiri.

Tinjauan tentang relativisme politik sebagai tantangan terhadap demokrasi merupakan tema yang perlu dikaji secara mendalam. Dengan memahami hubungan antara relativisme politik dengan masyarakat terbuka, dengan sendirinya juga dapat diidentifikasi model persoalan yang muncul, yang disebabkan oleh relativisme. Persoalan yang menguat dewasa ini adalah munculnya polarisasi masyarakat yang memiliki berbagai kepentingan dan saling berlawanan. Polarisasi dalam skala kecil biasanya terjadi antara individu-individu yang berbeda, namun persoalan yang sama akan menimbulkan dampak serius jika terjadi pada skala yang besar, yang terjadi di masyarakat luas, terutama dalam sistem politik. Hal itu akan menciptakan ketidaksetaraan, dan yang lebih serius lagi adalah terjadinya krisis legitimasi pemerintahan.

Legitimasi pemerintahan yang biasanya menjamin keamanan dan perlindungan terhadap kesetaraan individu, justru terancam karena berbagai latar belakang perbedaan. Legitimasi pemerintahan yang lemah menimbulkan tingkat kepercayaan yang lemah oleh masyarakat. Pada dasarnya, legitimasi pemerintahan mesti menciptakan di dalam diri individu-individu rasa percaya terhadap kekuasaan

⁷ Hannah Arendt, *Asal-Usul Totalitarianisme*, trans. J. M. Soebijanto (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 52.

yang mampu mengatur masing-masing individu. Secara moral, kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah atau pemimpin mesti lebih unggul dari masyarakat lainnya.⁸

Relativisme politik menciptakan persoalan yang lebih serius pada model masyarakat yang plural. Secara praktis, dunia politik dapat menuai persoalan jika paham atau ideologi dari kelompok tertentu ingin dipaksakan secara radikal kepada kelompok lain supaya menerima paham-paham tersebut tanpa ada ruang diskursus atau dialog. Pola seperti ini sering terjadi pada masyarakat yang saling bertentangan antara golongan mayoritas dan golongan minoritas.⁹ Hal ini cukup berbahaya pada ruang demokrasi, karena bertolak belakang dengan sistem demokrasi itu sendiri.

Hannah Arendt menyebutkan bahwa perwujudan diri dari politik atau demokrasi itu sendiri terjadi dalam ruang diskusi di mana ruang antara manusia terbuka dan sebuah dunia bersama terbentuk.¹⁰ Ini merupakan legalitas demokrasi, yang mencirikan keterbukaan serta transparansi di mana publik ikut berpartisipasi. Selain itu, demokrasi mencerminkan netralitas, tidak bertindak berdasarkan isu-isu budaya, agama atau pun latar belakang tertentu. Demokrasi dalam ruang pluralitas mencirikan keterbukaan, dan nilai-nilai yang diterapkan tidak mendiskredit kelompok tertentu. Negara mesti tidak dikendalikan oleh kelompok tertentu seperti agama ataupun budaya manapun.¹¹ Negara hanya bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri. Di sini negara mencirikan yang memiliki kekuasaan absolut yang berada di luar atau di atas kepentingan manapun.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, relativisme politik semakin nyata dan menguat dalam praktik politik elektoral maupun kebijakan publik. Contohnya dalam proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden yang penuh dengan kontroversi dan problematik. Sebagai calon wakil presiden, Gibran dinyatakan lolos dalam pendaftaran sebagai calon wakil presiden meskipun diketahui tidak mengikuti ketentuan batas usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023

⁸ Franz Magnis Suseno, *op. Cit.*, hlm 361.

⁹ Felix Baghi, ed., *Pluralisme Demokrasi Dan Toleransi* (Maumere: Ledalero, 2012), hlm. 29.

¹⁰ Hannah Arendt, *The Promise of Politics* (New York: Schocken Books, 2005), hlm. 95.

¹¹ Felix Baghi, *op. Cit.*, hlm. 265.

yang mengacu pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XX/2023, yang mensyaratkan bahwa kandidat berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman menduduki jabatan publik yang diperoleh melalui pemilu, serta kepala daerah. Sementara usia Gibran sendiri pada saat proses pencalonan sebagai wakil presiden baru berusia 36 tahun.

Lolosnya Gibran secara sah menjadi calon wakil presiden tidak terlepas dari campur tangan ketua MK yaitu Anwar Usman yang merupakan paman dari Gibran sendiri. Pencalonan Gibran sebagai wakil presiden yang penuh kontroversial merupakan model atau bentuk politisasi hukum. Relativisme politik turut lahir dalam praktik politik elektoral di mana aturan dan norma demokrasi dapat ditafsir demi kepentingan politik kelompok tertentu. Gejala-gejala yang ada hendak menegaskan bahwa demokrasi Indonesia dipengaruhi atau didominasi oleh relativisme politik dalam berbagai aspek kehidupan berpolitik.

Kenyataan di atas menarik untuk dibaca dan dianalisis dalam terang filsafat kritis Karl Popper, yang melihat relativisme politik sebagai model dari masyarakat tertutup. Implikasi dari relativisme politik adalah hilangnya ruang kritis bagi masyarakat, di mana rasionalitas diendap ke dasar yang hampir tidak terlihat, yang pada akhirnya menciptakan otoritarianisme. Menanggapi situasi ini, Karl Popper menawarkan masyarakat terbuka sebagai model masyarakat yang menjamin serta mendukung stabilitas demokrasi yaitu dengan bersikap kritis, transparan serta terbuka terhadap keragaman gagasan di ruang publik. Oleh karenanya, penulis coba mengelaborasi persoalan tersebut dalam suatu karya ilmiah yang berjudul: *“ANALISIS RELATIVISME POLITIK SEBAGAI MODEL MASYARAKAT TERTUTUP DALAM KAJIAN FILSAFAT KRITIS KARL RAIMUND POPPER”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah utama yang bisa dirumuskan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana menganalisis relativisme politik sebagai model masyarakat tertutup dalam kajian filsafat kritis Karl Popper? Adapun masalah-masalah turunannya sebagai berikut:

1. Apa itu relativisme politik?

2. Bagaimana pandangan Karl Popper tentang masyarakat tertutup?
3. Apa implikasi relativisme politik terhadap masa depan demokrasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan, ada dua tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Ada beberapa tujuan umum dari penelitian ini, yaitu:

Pertama, menganalisis relativisme politik sebagai model masyarakat tertutup dalam kajian filsafat kritis Karl Popper.

Kedua, menjelaskan hakikat relativisme politik, asal-usul dan perkembangannya dari zaman barat kuno hingga postmodernisme.

Ketiga, mengkaji pemikiran Karl Popper mengenai relativisme politik dan konsep masyarakat tertutup.

Keempat, menjelaskan implikasi relativisme politik terhadap masa depan demokrasi, termasuk dalam konteks Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Pertama, manfaat teoretis. Karya tulis ini memberi khazanah kajian filsafat politik, khususnya mengenai hubungan antara relativisme politik dan teori masyarakat terbuka Karl Popper, dengannya masyarakat dapat menilai relativisme politik sebagai ancaman bagi stabilitas demokrasi. Selain itu, karya tulis ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan teori mengenai bahaya relativisme dalam berbagai penelitian selanjutnya terutama terkait isu serupa.

Kedua, manfaat praktis. Karya tulis ini memberi wawasan bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti tentang persoalan relativisme politik, sehingga dapat menjadi dasar dalam mengembangkan pemikiran kritis terhadap fenomena pemikiran modern, dengannya dapat mendorong masyarakat untuk menghayati sikap politik yang lebih dewasa, rasional serta mendasarinya dengan nilai keterbukaan baik bagi individu maupun komunitas bersama.

Pada akhirnya karya tulis ini juga dapat berguna sebagai peringatan bagi para pemangku kebijakan seperti pemerintah, partai politik, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk menciptakan strategi demokrasi yang kuat sehingga tidak terjebak dalam pola pikir relativistik yang dapat menutup ruang rasionalitas publik.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui sejumlah tahapan analitis. *Pertama*, diawali dengan penelusuran dan kajian terhadap sumber-sumber primer (karya Popper) sebagai dasar penelitian, literatur sekunder dari literatur filsafat politik, buku, jurnal, dan artikel ilmiah. *Kedua*, setelah mengumpulkan data, penulis berusaha menganalisis (*content analysis*) dan melakukan interpretasi filosofis atas data yang dikumpulkan. Setelah itu, peneliti melakukan pertukaran gagasan dengan beberapa orang narasumber untuk memperkaya serta mempertajam pemahaman terkait dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan, skripsi ini disusun ke dalam lima (5) bab sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan. Bab II berisikan pembahasan tentang relativisme politik: konsep dan perkembangannya yang meliputi: definisi relativisme politik, asal-usul dan perkembangannya dari zaman kuno, modern, hingga postmodernisme, karakteristik sosial budaya, dampak negatif terhadap demokrasi, serta model pemerintahan yang rentan terhadap relativisme politik. Bab III berisikan pembahasan tentang relativisme politik sebagai model masyarakat tertutup dalam kajian kritis Karl Raimund Popper, yang menjelaskan biografi Popper, karya-karyanya, filsafat ilmu dan rasionalis kritis, latar belakang pemikiran tentang masyarakat tertutup, konsep masyarakat terbuka, serta analisis kritis Karl Popper terhadap relativisme politik. Bab IV berisikan uraian tentang analisis relativisme politik sebagai model

masyarakat tertutup dan implikasinya yang meliputi dampak relativisme politik terhadap struktur sosial dan demokrasi, strategi menangkal relativisme politik, evaluasi masyarakat modern serta studi kasus demokrasi kontemporer. Bab V merupakan penutup, yang menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang bersifat teoretis dan praktis kepada pihak-pihak terkait.